



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI
DENGAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 31 Januari 2018
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d 14.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Ketua Rapat	: Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: ... Orang dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI : Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin
Hadir Pemeritah	: Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
Acara	: 1. Evaluasi Kinerja Tahun 2017 : 2. Rencana Kegiatan Tahun 2018 : 3. Dan lain-lain

KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VII DPR RI pada Hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 dibuka pukul 10.20 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si., dan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Evaluasi Kinerja Tahun 2017
 - b. Rencana Kegiatan Tahun 2018
 - c. Dan lain-lain

II. KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

1. Komisi VII DPR RI mengapresiasi capaian kinerja anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tahun Anggaran 2017 dengan serapan anggaran sebesar 90.65%, namun demikian Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI agar lebih meningkatkan kinerja dan realisasi serapan anggaran di Tahun Anggaran 2018.
2. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI terkait dengan rencana perhutanan sosial dan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) fokus pada penanganan konflik tenurial, impelentasi *agroforestry*, pembentukan kelompok usaha masyarakat tepian hutan, dan mensosialisasikan tata peraturannya.
3. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk membentuk tim penanganan kegiatan penambangan ilegal dan pelanggaran aturan lingkungan hidup dan kehutanan, baik di dalam maupun diluar kawasan IPPKH bersama dengan Kementerian ESDM RI.
4. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahan pengganti penggunaan Merkuri dan teknologinya pada proses kegiatan industri dan penambangan emas.
5. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI merealisasikan seluruh komitmen aspirasi masyarakat sebagai hasil keputusan rapat yang telah disepakati bersama di Komisi VII, dan melaksanakan program sosialisasi aspirasi masyarakat terkait dengan pentingnya peduli terhadap lingkungan hidup.
6. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk lebih aktif mendukung dan mengembangkan Energi Baru Terbarukan berbasis kehutanan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang *Paris Agreement*.
7. Komisi VII DPR RI meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI, disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari 2018.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 14.30 WIB

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN RI**

Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc

Jakarta, 31 Januari 2018
KETUA RAPAT,

Dr. Ir. H. E. HERMAN KHAERON, M.Si